

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang tidak hanya dialami oleh beberapa negara berkembang, namun juga bagi beberapa negara maju yang telah memiliki sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang memadai. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, salah satunya yaitu Indonesia (Sofian Rafil, 2019). Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintahan negara berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam upaya pengentasan kemiskinan (World Bank, 2023). Meski pun telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan secara bertahap dalam dua dekade terakhir, angka kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), persentase penduduk miskin di Indonesia pada september 2023 tercatat sebesar 9,36 % atau setara dengan 25,9 juta jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian besar masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan dan belum mampu memenuhi kebutuhan primer secara layak (BPS, 2023).

Pendidikan adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Meski pun Indonesia memiliki kebijakan wajib belajar 12 tahun, kesenjangan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar. Ketimpangan pendidikan ini sangat terlihat antara wilayah perkotaan dan

pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Di daerah pedesaan atau kawasan tertinggal, fasilitas pendidikan masih terbatas, kualitas pengajaran kurang, dan banyak anak dari keluarga miskin yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan biaya atau kebutuhan untuk membantu keluarga mereka bekerja. Anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akan kesulitan bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang hanya memiliki pendidikan rendah cenderung memiliki peluang lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah layak, sehingga mereka terperangkap dalam kemiskinan. Masalah ini menciptakan siklus kemiskinan yang dapat bertahan turun-temurun, di mana anak-anak dari keluarga miskin tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak dari keluarga yang lebih mampu.

Selanjutnya mengenai kebijakan upah minimum Pemerintah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) di berbagai wilayah di Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, meskipun terdapat upah minimum yang diatur oleh pemerintah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan penghasilan antar wilayah sangat besar. Upah minimum yang ditetapkan di kota-kota besar seperti Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah di luar Jawa, seperti Papua atau Nusa Tenggara. Selain itu, upah minimum sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, terutama di daerah-daerah dengan biaya hidup yang tinggi. Sementara itu, penerapan upah minimum yang terlalu tinggi di sektor formal dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja atau bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK),

terutama di sektor yang banyak menggantungkan diri pada pekerja dengan keterampilan rendah.

Pandemi COVID-19 memperburuk situasi ini dengan cara yang signifikan. Pembatasan sosial dan ekonomi yang diterapkan selama pandemi menyebabkan banyak sektor usaha mengalami penurunan, terutama sektor pariwisata, perdagangan, dan manufaktur. Banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan kehilangan pekerjaan mereka. Sebagian besar yang terdampak adalah pekerja dengan pendidikan rendah, yang bekerja di sektor informal. Mereka yang bekerja di sektor ini tidak mendapatkan jaminan sosial yang memadai dan rentan terhadap gejolak ekonomi. Selain itu, sektor pendidikan juga sangat terpengaruh oleh pandemi. Pembelajaran daring yang diterapkan selama pandemi tidak dapat diakses secara merata oleh semua siswa, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil dengan akses internet yang terbatas. Ketidakmerataan akses pendidikan ini semakin memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada, yang pada gilirannya memperburuk tingkat kemiskinan di Indonesia. Sektor informal di Indonesia menyerap lebih dari 70% angkatan kerja, namun mayoritas pekerja di sektor ini memiliki penghasilan yang rendah dan tidak terjamin. Banyak pekerja di sektor informal tidak mendapatkan hak-hak dasar, seperti upah minimum yang layak, jaminan kesehatan, atau pensiun. Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap kemiskinan meskipun mereka bekerja keras sepanjang hari. Dalam sektor informal, mobilitas sosial terbatas, dan pekerjaan yang ada sering kali tidak memberikan peluang untuk meningkatkan keterampilan atau pendapatan, yang memperburuk kemiskinan struktural.

Kejadian-kejadian ini saling berinteraksi dan membentuk dinamika yang kompleks, sehingga pengaruh pendidikan, upah minimum, dan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan memerlukan analisis yang lebih mendalam. Dengan memahami keterkaitan antara ketiga faktor ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru yang lebih komprehensif untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

### ***Gap Penelitian***

Penelitian oleh Susanti (2019) menemukan bahwa pendidikan yang lebih tinggi memang berhubungan dengan penurunan tingkat kemiskinan secara umum. Namun, di sektor informal, dampak pendidikan tidak signifikan karena keterampilan formal sering kali tidak relevan atau dihargai. Banyak penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan adalah faktor kunci dalam mengurangi kemiskinan. Pendidikan yang lebih tinggi memberikan akses ke pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas individu. Namun, di sektor informal, peran pendidikan formal sering kali diabaikan karena sektor ini lebih menghargai keterampilan praktis dibandingkan ijazah. Penelitian sebelumnya belum mengeksplorasi secara spesifik bagaimana dampak pendidikan pada pekerja informal yang mendominasi ekonomi Indonesia. Tidak banyak studi yang menjelaskan mengapa pendidikan formal kurang relevan di sektor informal.

Penelitian oleh Sutanto & Lestari (2020) menemukan bahwa upah minimum meningkatkan pendapatan tenaga kerja formal. Namun, kebijakan ini tidak signifikan dalam menurunkan kemiskinan karena mayoritas pekerja Indonesia berada di sektor informal yang tidak terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Sebelumnya, kebijakan upah minimum sering dianggap sebagai alat untuk

meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi kemiskinan. Namun, dampaknya sering kali terbatas pada tenaga kerja formal. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sektor informal tidak dijangkau oleh kebijakan upah minimum. Penelitian yang ada sering kali hanya berfokus pada dampak upah minimum pada sektor formal, sehingga belum banyak yang membahas efeknya pada kemiskinan secara keseluruhan, terutama dalam konteks dominasi sektor informal di Indonesia.

Penelitian oleh Purwanto (2021) menunjukkan bahwa ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja menjadi penyebab utama pengangguran. Kondisi ini memperburuk tingkat kemiskinan karena pekerja tidak dapat bersaing di pasar kerja yang membutuhkan keterampilan spesifik. Banyak studi telah menunjukkan bahwa pengangguran adalah salah satu faktor utama penyebab kemiskinan. Pengangguran terjadi ketika tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Penelitian sebelumnya sering mengidentifikasi bahwa ketidaksesuaian antara keterampilan dan kebutuhan pasar kerja menjadi penghalang utama dalam mengurangi pengangguran. Studi-studi sebelumnya kurang mengeksplorasi secara mendalam bagaimana ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan pasar kerja secara spesifik berdampak pada tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Dissanayake (2013) menyatakan bahwa gap teori mengacu pada kurangnya pengetahuan dalam suatu bidang yang dapat diidentifikasi melalui literatur sebelumnya. Hal ini penting untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan membangun teori baru. Teori dasar sejauh ini mungkin memiliki keterbatasan atau kelemahan yang tidak mendukung penelitian. Bisa juga hasil

dari penelitian yang didapat belum dijelaskan oleh teori apapun. Dalam penelitian ini menggunakan teori model manusia menurut Gary. S. Becker (1964) dimana Gary S. Becker, memperkenalkan konsep teori modal manusia yang telah menjadi landasan penting dalam memahami hubungan antara investasi pada manusia, seperti pendidikan dan pelatihan, dengan pengurangan tingkat kemiskinan. Becker menegaskan bahwa sumber daya manusia bukan hanya sekadar komponen pasif dalam proses ekonomi, tetapi merupakan bentuk modal yang jika dikembangkan dengan baik, dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap produktivitas dan kesejahteraan ekonomi individu.

### ***Gap Teori***

Penelitian Susanti (2019) menemukan bahwa pendidikan tinggi berkontribusi pada penurunan kemiskinan secara umum, tetapi kurang berdampak di sektor informal karena keterampilan formal sering kali tidak relevan. Untuk memahami fenomena ini, penelitian terdahulu menggunakan beberapa teori sebagai dasar analisis.

1. Teori Modal Manusia (Becker, 1964) menjelaskan bahwa pendidikan meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu, tetapi dalam sektor informal, keterampilan praktis lebih dihargai dibandingkan ijazah.
2. Teori Dualisme Ekonomi (Lewis, 1954) membagi ekonomi menjadi sektor formal, yang bergantung pada pendidikan formal, dan sektor informal, yang lebih fleksibel serta tidak terlalu menekankan kualifikasi akademis.
3. Teori Ketidak sesuaian Keterampilan (Allen & Van der Velden, 2001) menyoroti kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, yang membuat keterampilan akademis kurang relevan dalam sektor informal.

4. Teori Modal Sosial (Bourdieu, 1986; Putnam, 1993) juga berperan, karena di sektor informal, jaringan sosial dan pengalaman lebih menentukan peluang kerja dibandingkan pendidikan formal. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pendidikan tinggi dapat mengurangi kemiskinan secara luas, dampaknya di sektor informal terbatas karena perbedaan kebutuhan keterampilan dan mekanisme perekrutan tenaga kerja.

Penelitian Sutanto & Lestari (2020) menunjukkan bahwa upah minimum meningkatkan pendapatan tenaga kerja formal, tetapi tidak signifikan dalam menurunkan kemiskinan karena mayoritas pekerja Indonesia berada di sektor informal yang tidak terpengaruh oleh kebijakan ini. Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penelitian terdahulu menggunakan beberapa teori sebagai landasan.

1. Teori Pasar Tenaga Kerja Dualisme (Doeringer & Piore, 1971) membagi pasar tenaga kerja menjadi sektor formal yang tunduk pada regulasi dan sektor informal yang lebih fleksibel tetapi tidak dilindungi kebijakan upah minimum.
2. Teori Efek Penggajian (Card & Krueger, 1995) menjelaskan bahwa upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja formal, namun tidak berdampak pada sektor informal. Selain itu, teori Ketidak seimbangan Struktural (Lewis, 1954) menyoroti bahwa dominasi sektor informal di negara berkembang menyebabkan kebijakan upah minimum hanya menjangkau sebagian kecil pekerja.
3. Teori Segmented Labor Market menegaskan bahwa tenaga kerja terbagi dalam berbagai segmen dengan aturan yang berbeda, sehingga kebijakan upah minimum tidak dapat menyentuh seluruh pekerja. Dengan demikian, penelitian ini menggaris bawahi bahwa upah minimum memiliki dampak

terbatas dalam mengurangi kemiskinan karena tidak mencakup sektor informal yang menjadi mayoritas tenaga kerja di Indonesia.

Penelitian Purwanto (2021) mengungkap bahwa ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja menjadi penyebab utama pengangguran, yang pada akhirnya memperburuk tingkat kemiskinan karena pekerja tidak dapat bersaing di pasar kerja yang menuntut keterampilan spesifik. Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penelitian terdahulu menggunakan beberapa teori sebagai landasan.

1. Teori Ketidaksesuaian Keterampilan (Allen & Van der Velden, 2001) menyoroti bahwa perbedaan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja menyebabkan pengangguran.
2. Teori Modal Manusia (Becker, 1964) menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan hanya efektif jika sesuai dengan permintaan pasar.
3. Teori Pasar Tenaga Kerja Segmented (Doeringer & Piore, 1971) menunjukkan bahwa tenaga kerja terbagi dalam segmen-segmen dengan tingkat akses dan keterampilan yang berbeda, sehingga tidak semua pekerja dapat beradaptasi dengan perubahan ekonomi.
4. Teori Struktural Pengangguran (Keynes, 1936) menekankan bahwa perubahan industri dan teknologi dapat menciptakan kesenjangan keterampilan yang memicu pengangguran jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa ketidaksesuaian keterampilan merupakan penghambat utama dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan, menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan teori Gary S. Becker dan teori Robert Chambers. Dalam teorinya, Becker menjelaskan bahwa investasi pada pendidikan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Hasilnya adalah peningkatan pendapatan yang memungkinkan individu untuk keluar dari siklus kemiskinan. Studi ini juga menunjukkan bahwa pendidikan memberikan peluang lebih besar bagi mobilitas ekonomi, memungkinkan individu untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan memperluas cakupan ekonomi mereka. Misalnya, seseorang yang memiliki pendidikan tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi, dibandingkan mereka yang memiliki pendidikan rendah (Weiss, 2015). Becker juga menggaris bawahi bahwa teori ini dapat membantu mempersempit ketimpangan ekonomi. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata, masyarakat dapat menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi kelompok yang terpinggirkan, seperti kaum miskin atau minoritas. Investasi dalam modal manusia tidak hanya memberikan keuntungan individu tetapi juga berdampak pada tingkat sosial dengan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan keadilan ekonomi secara keseluruhan (Teixeira, 2014).

Yang membedakan teori Gary S. Becker dengan teori lainnya ialah:

Teori Robert Chambers, Robert Chambers adalah seorang akademisi terkemuka dalam bidang pembangunan internasional yang memiliki pengaruh besar dalam memahami dan mengatasi kemiskinan. Ia berpendapat bahwa kemiskinan adalah fenomena multidimensi yang tidak dapat direduksi hanya menjadi masalah kekurangan pendapatan atau sumber daya ekonomi. Dalam pandangan Chambers, kemiskinan adalah hasil dari interaksi berbagai faktor

sosial, ekonomi, dan politik yang saling memperkuat. Hal ini diperkenalkan dalam konsep *deprivation trap* atau jebakan kemiskinan.

Menurut Chambers, ada lima elemen utama yang membentuk jebakan kemiskinan. Elemen pertama adalah kemiskinan itu sendiri, yang mencerminkan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi seperti uang, tanah, dan pekerjaan. Kemudian, terdapat ketidak berdayaan (*powerlessness*), yaitu kurangnya kemampuan seseorang untuk memengaruhi keputusan-keputusan yang berdampak pada kehidupannya. Faktor ketiga adalah kerentanan (*vulnerability*), yang menggambarkan ketidak mampuan individu untuk menghadapi risiko, guncangan, atau perubahan yang tidak terduga, seperti bencana alam atau fluktuasi ekonomi.

Selanjutnya, Chambers juga mengidentifikasi kelemahan fisik (*physical weakness*), yaitu kondisi kesehatan yang buruk atau kekurangan gizi yang dapat menghambat produktivitas seseorang. Terakhir, isolasi menjadi faktor kelima, yaitu keterbatasan akses terhadap informasi, pendidikan, pasar, atau layanan dasar yang membuat individu atau komunitas terpinggirkan dari sistem sosial dan ekonomi. Kelima elemen ini saling terkait, menciptakan lingkaran setan yang membuat kemiskinan terus berlangsung dan sulit diatasi.

Selain itu, Chambers juga menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya harus dipahami melalui data statistik, tetapi juga melalui pengalaman subjektif orang miskin itu sendiri. Ia menyoroti bagaimana rasa malu, penghinaan, ketidak berdayaan, dan eksklusi sosial sering kali menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari orang miskin, yang tidak tercermin dalam angka-angka statistik tradisional. Dalam karyanya, Chambers sering mengkritik pendekatan pembangunan

konvensional yang bersifat top-down dan mengabaikan perspektif serta kebutuhan masyarakat miskin. Sebagai alternatif, ia memperkenalkan pendekatan partisipatif dalam pembangunan. Pendekatan ini melibatkan masyarakat miskin sebagai aktor utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Chambers percaya bahwa solusi yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika masyarakat yang terdampak dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak hanya memberdayakan masyarakat miskin tetapi juga memungkinkan solusi yang lebih relevan dan efektif. Dalam konteks global, teori Robert Chambers telah memberikan kontribusi besar dalam memperluas cara pandang terhadap kemiskinan. Pendekatannya diterapkan secara luas oleh organisasi internasional, pemerintah, dan LSM dalam berbagai program pembangunan. Melalui karyanya, Chambers mengajarkan pentingnya mendengarkan suara orang miskin dan memahami kompleksitas kemiskinan yang melampaui sekadar kurangnya uang atau harta benda.

Teori yang dikembangkan oleh Gary S. Becker dan Robert Chambers memberikan perspektif yang mendalam untuk memahami dan merancang kebijakan yang relevan bagi Indonesia. Gary S. Becker, dengan gagasannya tentang ekonomi keluarga dan modal manusia (*human capital*), menawarkan pandangan bahwa manusia adalah aset ekonomi yang berharga. Menurut Becker, investasi pada pendidikan dan kesehatan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan, pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bagi Indonesia, teori ini memberikan pijakan kuat untuk memahami pentingnya kebijakan yang memperbaiki akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Program-program seperti *Kartu Indonesia Pintar* dan *BPJS*

*Kesehatan* merupakan langkah nyata pemerintah untuk meningkatkan kualitas modal manusia, sejalan dengan pemikiran Becker. Becker juga menyoroti dampak diskriminasi terhadap ekonomi. Di Indonesia, ketimpangan berbasis gender, etnis, atau status sosial masih menjadi isu besar. Ini menghambat potensi besar yang dimiliki kelompok tertentu untuk berkontribusi penuh dalam pembangunan ekonomi. Misalnya, peran perempuan dalam dunia kerja sering kali terhambat oleh kurangnya akses terhadap pendidikan dan peluang. Pemikiran Becker mengingatkan bahwa menghapus diskriminasi tidak hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Lebih jauh, Becker memandang keluarga sebagai unit ekonomi yang penting dalam mengalokasikan sumber daya. Di Indonesia, dinamika keluarga, baik dalam konteks masyarakat pedesaan yang agraris maupun masyarakat perkotaan modern, menjadi landasan penting dalam berbagai kebijakan sosial. Dengan memahami keluarga sebagai unit yang memengaruhi perekonomian, pemerintah dapat lebih efektif mendesain program kesejahteraan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Di sisi lain, Robert Chambers memberikan pendekatan yang berbeda tetapi tidak kalah pentingnya, yaitu fokus pada pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Chambers percaya bahwa pemahaman atas kehidupan masyarakat miskin harus menjadi inti dari setiap kebijakan pembangunan. Di Indonesia, di mana sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan, pendekatan ini memiliki relevansi yang sangat kuat. Program seperti Dana Desa menjadi salah satu bentuk implementasi pemikiran Chambers dalam konteks Indonesia. Dengan mendistribusikan dana

langsung ke desa-desa, masyarakat lokal memiliki kesempatan untuk merancang dan mengelola program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini memperkuat pemikiran bahwa pembangunan yang berhasil harus melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan. Selain itu, Chambers menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan, baik dari segi sosial maupun lingkungan. Isu-isu seperti deforestasi, degradasi lahan, dan perubahan iklim menjadi tantangan besar di Indonesia. Teori Chambers menggaris bawahi pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga sumber daya alam mereka, sekaligus memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merugikan generasi mendatang.

Kedua teori ini, meskipun memiliki perspektif yang berbeda, memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan di Indonesia. Teori Gary S. Becker menekankan pentingnya investasi pada modal manusia sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, teori Robert Chambers menggaris bawahi pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia, berbasis partisipasi, dan berkelanjutan sebagai solusi terhadap masalah kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Dengan mengintegrasikan kedua gagasan tersebut, Indonesia dapat mengimplementasikan kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, guna mencapai pembangunan yang lebih holistik dan efektif.

Dapat dilihat pada table berikut Persentase kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2024.

**Tabel 1.1**

**Persentase kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Persentase kemiskinan (%)</b>
<b>2015</b>	11,13
<b>2016</b>	10,70
<b>2017</b>	10,12
<b>2018</b>	9.66
<b>2019</b>	9.22
<b>2020</b>	10.19
<b>2021</b>	9,71
<b>2022</b>	9,57
<b>2023</b>	9,36
<b>2024</b>	9,03
<b>Rata-rata</b>	<b>9,94</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 1.1 menunjukkan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2015-2024. Secara umum dapat dilihat dari tahun 2015-2024 persentase penduduk miskin tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 11,13 persen dan penduduk miskin terendah terdapat pada tahun 2024 sebesar 9,03 persen. Rata-rata penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,94 persen.

Menurut BPS rata-rata jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,52 juta jiwa dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 9,94 persen. Berikut data persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2015-2024.

**Tabel 1.2**

**Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2015-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Penduduk Miskin</b>	
	<b>Persentase Kemiskinan (%)</b>	<b>Jumlah ( Juta Jiwa )</b>
<b>2015</b>	11,13	28,51
<b>2016</b>	10,70	27,75
<b>2017</b>	10,12	26,58
<b>2018</b>	9.66	25,67
<b>2019</b>	9.22	25,14

<b>2020</b>	10,19	27,55
<b>2021</b>	9,71	26,50
<b>2022</b>	9,57	26,36
<b>2023</b>	9,36	25,90
<b>2024</b>	9,03	25,22
<b>Rata-rata</b>	<b>9,94</b>	<b>26,52</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Data diolah penulis, 2025

Berdasarkan pada tabel 1.2 jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode 2015-2024 secara umum mengalami penurunan, meski pun terdapat fluktuasi akibat beberapa faktor seperti pandemi COVID-19 pada periode 2020. Jumlah maupun persentase penduduk miskin mengalami penurunan yang signifikan dimulai dari tahun 2016-2019, yakni sebesar 27,75 juta jiwa dan 10,70 persen untuk tahun 2016, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 25,14 juta jiwa dan 9,22 persen. Jumlah maupun persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan hingga tahun 2024 sebesar 25,22 juta jiwa dan 9,03 persen. Data ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia selama periode tersebut menunjukkan keberhasilan berbagai program pemerintah dan upaya kolektif Masyarakat.

Upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, termasuk Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, subsidi pangan, jaminan Kesehatan, dan penguatan kapasitas individu dan lain sebagainya. Upaya yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar pembangunan suatu negara. Melalui pendidikan yang berkualitas, sebuah negara dapat mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing di era global. Tanpa pendidikan yang berkualitas, kualitas sosial ekonomi, kesehatan,

dan gizi tidak dapat dipertahankan. Selain itu, untuk mengentaskan kemiskinan, banyak orang mengenyam Pendidikan untuk mengubah jenjang kehidupannya (Dio Syahrullah, 2014). Terlihat bahwa dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan, investasi di bidang pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah memberlakukan kebijakan wajib belajar sembilan tahun untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia agar masyarakat Indonesia dapat menjadi pekerja yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas dan mendorong peningkatan efisiensi kinerja. Selain itu, kemiskinan dapat dikurangi dan banyak orang dapat memperoleh pendidikan dan mengubah taraf hidupnya.

**Tabel 1.3**

**Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Indonesia Tahun 2015-2024**

Tahun	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan			
	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi
2015	27.79	21.44	32.25	7.95
2016	33.08	16.49	34.27	7.92
2017	28.03	21.71	33.25	8.15
2018	25.63	21.24	35.11	8.76
2019	25.13	22.31	35.95	9.26
2020	24.80	21.78	38.59	9.49
2021	25.10	22.15	38.88	9.67
2022	24.83	22.56	40.12	10.15
2023	24.62	22.74	40.38	10.15
2024	24.72	22.79	41.05	10.20

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Data diolah penulis, 2025

Pada tabel 1.3 menunjukkan tingkat penyelesaian Pendidikan di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan baik jenjang Pendidikan SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Pada tahun 2015 tingkat penyelesaian Pendidikan pada jenjang SD sebesar 27.79 pada jenjang SMP sebesar 21.44, pada

jenjang SMA sebesar 32.25 dan pada jenjang Perguruan Tinggi sebesar 7.95. Peningkatan menunjukkan tingkat penyelesaian Pendidikan di Indonesia pada delapan tahun kedepan terus mengalami peningkatan pada jenjang SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi sebesar 22.79, 41.05, dan 10.20 dari tahun 2026.

**Tabel 1.4**  
**Tingkat Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2024**

38 Provinsi	Upah Minimum Regional/Provinsi (Rupiah)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>ACEH</b>	1.900.000	2.118.500	2.500.000	2.700.000	2.916.810	3.165.031	3.165.031	3.166.460	3.413.666	3.413.666
<b>SUMATERA UTARA</b>	1.625.000	1.811.875	1.961.354	2.132.189	2.303.403	2.499.423	2.499.423	2.522.609	2.710.493	2.710.493
<b>SUMATERA BARAT</b>	1.615.000	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.289.220	2.484.041	2.484.041	2.512.539	2.742.476	2.811.449
<b>RIAU</b>	1.878.000	2.095.000	2.266.722	2.464.154	2.662.026	2.888.564	2.888.564	2.938.564	3.191.662	3.191.662
<b>JAMBI</b>	1.710.000	1.906.650	2.063.948	2.243.719	2.423.889	2.630.162	2.630.162	2.698.940	2.943.000	2.943.000
<b>SUMATERA SELATAN</b>	1.974.346	2.206.000	2.388.000	2.595.995	2.804.453	3.043.111	3.043.111	3.144.446	3.404.177	3.404.177
<b>BENGKULU</b>	1.500.000	1.605.000	1.730.000	1.888.741	2.040.407	2.213.604	2.215.000	2.238.094	2.418.280	2.418.280
<b>LAMPUNG</b>	1.581.000	1.763.000	1.908.447	2.074.673	2.241.270	2.432.002	2.432.001	2.440.486	2.633.284	2.633.284
<b>BANGKA BELITUNG</b>	2.100.000	2.341.500	2.534.673	2.755.444	2.976.706	3.230.024	3.230.023	3.264.884	3.498.479	3.498.479
<b>KEP. RIAU</b>	1.954.000	2.178.710	2.358.454	2.563.875	2.769.754	3.005.460	3.005.460	3.050.172	3.279.194	3.402.492
<b>DKI JAKARTA</b>	2.700.000	3.100.000	3.355.750	3.648.036	3.940.973	4.276.350	4.416.186	4.641.854	4.901.798	5.067.381
<b>JAWA BARAT</b>	1.000.000	2.250.000	1.420.624	1.544.361	1.668.373	1.810.351	1.810.351	1.841.487	1.986.670	1.986.670
<b>JAWA TENGAH</b>	910.000	-	1.367.000	1.486.065	1.605.396	1.742.015	1.798.979	1.812.935	1.958.169	1.958.169
<b>DI YOGYAKARTA</b>	988.500	-	1.337.645	1.454.154	1.570.923	1.704.608	1.765.000	1.840.915	1.981.782	1.981.782

<b>JAWA TIMUR</b>	1.000.000	-	1.388.000	1.508.895	1.630.059	1.768.777	1.868.777	1.891.567	2.040.244	2.040.244
<b>BANTEN</b>	1.600.000	1.784.000	1.931.180	2.099.385	2.267.990	2.460.997	2.460.996	2.501.203	2.661.280	2.661.280
<b>BALI</b>	1.621.172	1.807.600	1.956.727	2.127.157	2.297.969	2.494.000	2.494.000	2.516.971	2.713.672	2.962.468
<b>NTB</b>	1.330.000	1.482.950	1.631.245	1.825.000	2.012.610	2.183.883	2.183.883	2.207.212	2.371.407	2.371.407
<b>NTT</b>	1.250.000	1.425.000	1.525.000	1.660.000	1.795.000	1.950.000	1.950.000	1.975.000	2.123.994	2.123.994
<b>KALIMANTAN BARAT</b>	1.560.000	1.739.400	1.882.900	2.046.900	2.211.500	2.399.699	2.399.698	2.434.328	2.608.602	2.608.601
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	1.896.367	2.057.558	2.222.986	2.421.305	2.663.435	2.903.145	2.903.144	2.922.516	3.181.013	3.181.013
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	1.870.000	2.085.050	2.258.000	2.454.671	2.651.782	2.877.449	2.877.448	2.906.473	3.149.977	3.282.812
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	2.026.126	2.161.253	2.339.556	2.543.332	2.747.561	2.981.379	2.981.378	3.014.497	3.201.396	3.201.396
<b>KALIMANTAN UTARA</b>	2.026.126	2.175.340	2.358.800	2.559.903	2.765.463	3.000.804	3.000.804	3.016.738	3.251.703	3.251.702
<b>SULAWESI UTARA</b>	2.150.000	2.400.000	2.598.000	2.824.286	3.051.076	3.310.723	3.310.723	3.310.723	3.485.000	3.485.000
<b>SULAWESI TENGAH</b>	1.500.000	1.670.000	1.807.775	1.965.232	2.123.040	2.303.711	2.303.711	2.390.739	2.599.546	2.599.546
<b>SULAWESI SELATAN</b>	2.000.000	2.250.000	2.500.000	2.647.767	2.860.382	3.103.800	3.165.876	3.165.876	3.385.145	3.522.000
<b>SULAWESI TENGGARA</b>	1.652.000	1.850.000	2.002.625	2.177.052	2.351.870	2.552.015	2.552.014	2.710.595	2.758.948	2.758.948
<b>GORONTALO</b>	1.600.000	1.875.000	2.030.000	2.206.813	2.384.020	2.788.826	2.788.826	2.800.580	2.989.350	2.800.580
<b>SULAWESI BARAT</b>	1.655.500	1.864.000	2.017.780	2.193.530	2.381.000	2.678.863	2.678.863	2.678.863	2.871.794	2.871.794
<b>MALUKU</b>	1.650.000	1.775.000	1.925.000	2.222.220	2.400.664	2.604.961	2.604.961	2.619.312	2.812.827	2.812.827
<b>MALUKU UTARA</b>	1.577.617	1.681.266	1.975.000	2.320.803	2.508.091	2.721.530	2.721.530	2.862.231	2.976.720	2.976.720

<b>PAPUA BARAT</b>	2.015.000	2.237.000	2.416.855	2.667.000	2.934.500	3.134.600	3.134.600	3.200.000	3.282.000	3.282.000
<b>PAPUA BARAT DAYA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.282.000
<b>PAPUA</b>	2.193.000	2.435.000	2.663.646	3.000.000	3.240.900	3.516.700	3.516.700	3.561.932	3.864.696	3.864.696
<b>PAPUA SELATAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.864.696
<b>PAPUA TENGAH</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.864.696
<b>PAPUA PEGUNUNGAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.864.696
<b>INDONESIA</b>	<b>1.790.342</b>	<b>1.997.819</b>	<b>2.142.855</b>	<b>2.268.874</b>	<b>2.455.662</b>	<b>2.672.371</b>	<b>2.687.723</b>	<b>2.729.463</b>	<b>2.923.307</b>	<b>3.025.160</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Kemnaker RI, Ditjend.PHI, JSK dan Data diolah penulis 2025

Pada tabel 1.4 Tingkat upah minimum di Indonesia mengalami peningkatan pada setiap tahun. Pada tahun 2015 rata-rata upah minimum sebesar 1.790.342 rupiah, dan pada tahun 2016 rata-rata upah minimum mengalami peningkatan sebesar 1.997.819 rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 sebesar 2.687.723 rupiah, pada tahun 2022 rata-rata upah minimum kembali mengalami peningkatan sebesar 2.729.463 rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 rata-rata upah minimum sebesar **3.025.160** rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

**Tabel 1.5**

**Jumlah dan Persentasi Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2015-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Bekerja</b>	<b>Jumlah Angkatan Kerja (AK)</b>	<b>% Bekerja / AK</b>
<b>2015</b>	114.819.199	122.380.021	93,82
<b>2016</b>	118.411.973	125.443.748	94,39
<b>2017</b>	121.022.423	128.062.746	94,50
<b>2018</b>	126.282.186	133.355.571	94,70
<b>2019</b>	128.755.271	135.859.695	94,77
<b>2020</b>	128.454.184	138.221.938	92,93
<b>2021</b>	131.050.523	140.152.575	93,51
<b>2022</b>	135.296.713	143.722.644	94,14
<b>2023</b>	139.852.377	147.707.452	94,68
<b>2024</b>	144.642.004	152.107.603	95,09

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Data diolah penulis, 2025

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah tenaga kerja, tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, dengan mekanisme dan dinamika yang bervariasi. Berdasarkan data dari BPS dalam tabel 1.5 jumlah tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 114.819.199 ribu orang, terlihat dari tabel 1.5 tenaga kerja di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya, pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 118.411.973 ribu orang, pada tahun 2017 sebesar 121.022.423 ribu orang, dan meningkat lagi pada tahun 2018 sebesar 126.282.186 ribu orang, pada tahun 2019 sebesar 128.755.271 ribu orang, dan di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 128.454.184 ribu orang hal ini diakibatkan dampak dari pandemi COVID-19, pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 131.050.523 ribu orang, dan di tahun 2022 meningkat sebesar 135.296.713 ribu orang, dan meningkat lagi pada tahun 2023 sebesar 139.852.377 ribu orang, pada tahun 2024 mengalami peningkatan lagi sebesar 144.642.004. Meski pun rata-rata setiap tahunnya jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan

namun pada kenyataannya hal ini tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut dan mengacu pada masalah yang terjadi, maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pengaruh tingkat kemiskinan di Indonesia. Faktor pendidikan, upah minimum, dan tenaga kerja yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Mengembangkan faktor yang diyakini mampu mempengaruhi tingkat kemiskinan yang meliputi, pendidikan, upah minimum, dan tenaga kerja di Indonesia. Sehingga judul penelitian yang diambil peneliti adalah **“Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum, Dan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendidikan terhadap kemiskinan sering dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan taraf hidup, tetapi belum banyak ada analisis mendalam tentang sejauh mana tingkat pendidikan memengaruhi kemiskinan di Indonesia.
2. Efektivitas Upah Minimum dalam mengurangi kemiskinan, apakah kebijakan upah minimum bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun efektivitasnya dalam menurunkan kemiskinan, terutama disektor informal, masih menjadi tanda tanya.
3. Peran Tenaga Kerja terhadap tingkat kemiskinan, Sebagian besar tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal, yang cenderung memiliki

pendapatan rendah dan tidak stabil, meski pun tingkat tenaga kerja mengalami kenaikan setiap tahunnya.

### **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

#### **1.3.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah untuk melakukan penelitian ini adalah :

1. Apakah Pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia?
2. Apakah Upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia?
3. Apakah Tenaga kerja berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia?

#### **1.3.2 Batasan Masalah**

Agar pembahasan penulisan skripsi ini menjadi rinci dan terarah, serta untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari judul dan tujuan tugas akhir, maka batasan masalah adalah “Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum, dan Tenaga Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Mengenai latar belakang dan rumusan masalah dimaksudkan ialah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kaitan antara Pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh kaitan antara Upah Minimum terhadap kemiskinan di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh kaitan antara Tenaga kerja terhadap kemiskinan di Indonesia

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menganalisis variabel, Pendidikan, Upah Minimum dan Tenaga Kerja mengenai Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan adalah :

### **1. Akademisi**

Manfaat penulisan proposal skripsi ini adalah penulis dapat menerapkan pembelajaran yang diperoleh selama mengikuti proses belajar mengajar pada saat perkuliahan dan memiliki kesempatan untuk mempelajari bagaimana menyelesaikan hambatan dan permasalahan yang timbul khususnya dalam mengetahui pengaruh Pendidikan, upah minimum, dan tenaga kerja terhadap Tingkat kemiskinan di Indonesia.

### **2. Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi Tingkat kemiskinan di Indonesia, serta memperkaya literatur empiris mengenai determinan kemiskinan di negara berkembang.

### **3. Penelitian selanjutnya**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca terutama sesama Mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir yang berkaitan dengan kemiskinan agar dapat menghasilkan karya tulis yang baik dan dapat dijadikan referensi untuk kedepannya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan ketidak mampuan masyarakat suatu wilayah untuk memenuhi taraf hidup ekonominya. Masalah ini biasanya terjadi karena rendahnya pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendapatan yang rendah membuat masyarakat sulit memenuhi standar hidup seperti tingkat Kesehatan, Pendidikan serta mendapatkan perlakuan ketidakadilan dalam hukum dan rentan terhadap timbulnya ancaman tindak kriminal. Permasalahan kemiskinan banyak terjadi di beberapa negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan dapat menimbulkan kesenjangan perlindungan sosial serta menimbulkan kesenjangan sosial antar masyarakat. Miskin adalah kondisi yang secara umum menggambarkan suatu rumah tangga, komunitas, yang berada dalam kekurangan, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan yang paling dasar. Menurut Robert Chambers, kemiskinan adalah fenomena multidimensi yang mencakup tidak hanya kekurangan ekonomi, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan struktural seperti ketidakberdayaan, kerentanan, isolasi, dan kelemahan fisik. Ia memperkenalkan konsep *deprivation trap* atau jebakan keterbelakangan, yang menggambarkan bagaimana faktor-faktor ini saling memperkuat dan memerangkap individu atau komunitas dalam kemiskinan. Chambers menekankan

pentingnya pendekatan partisipatif dan memahami pengalaman subjektif masyarakat miskin dalam mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP. 2003), dikutip dalam Kor, Akaakohol dan Mile (2013) menyatakan bahwa kemiskinan adalah fenomena sosial multidimensi yang bisa terjadi secara analitis. Dimana multidimensi tersebut dibagi menjadi dua dimensi utama yakni kemiskinan pendapatan, adalah kurangnya pendapatan yang perlu dipenuhi untuk kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan. Dimensi yang kedua yaitu kemiskinan manusia yang merupakan kurangnya kemampuan manusia misalnya harapan hidup, materi, kesehatan, pendidikan, nutrisi, dan persepsi kesejahteraan.

#### **2.1.1.1 Teori Kemiskinan**

Ada beberapa teori-teori kemiskinan dari beberapa ahli yang berdampak terhadap tingkat kemiskinan, teori tersebut antara lain:

##### **1. Teori Kemiskinan Robert Chambers**

Robert Chambers adalah seorang akademisi dan praktisi pembangunan internasional yang terkenal karena pendekatan inovatifnya dalam memahami dan mengatasi kemiskinan. Dalam pandangannya, kemiskinan adalah fenomena multidimensi yang tidak dapat dilihat hanya dari sisi ekonomi atau kekurangan pendapatan. Ia menjelaskan bahwa kemiskinan melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, politik, dan psikologis, yang seringkali saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain. Untuk memahami kemiskinan secara komprehensif, Chambers memperkenalkan konsep “deprivation trap” atau jebakan keterbelakangan. Menurut Chambers, kemiskinan adalah hasil dari interaksi lima elemen utama yang membentuk sebuah lingkaran setan, sehingga membuat

individu atau komunitas sulit keluar dari kondisi kemiskinan. Elemen-elemen tersebut adalah:

1. Kemiskinan (Poverty): Keterbatasan sumber daya ekonomi yang menyebabkan individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan.
2. Ketidak berdayaan (Powerlessness): Ketidakseimbangan kekuasaan yang membuat masyarakat miskin tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.
3. Kerentanan (Vulnerability): Ketidakmampuan untuk menghadapi guncangan atau risiko eksternal, seperti bencana alam, konflik, atau krisis ekonomi.
4. Kelemahan fisik (Physical Weakness): Kondisi kesehatan yang buruk akibat kurangnya gizi atau akses ke layanan kesehatan, yang menghambat produktivitas dan kapasitas individu.
5. Isolasi (Isolation): Keterbatasan akses terhadap informasi, pendidikan, pasar, atau layanan dasar, yang memperburuk keterpinggiran masyarakat miskin dari sistem sosial dan ekonomi.

Chambers menjelaskan bahwa kelima elemen ini saling memperkuat, menciptakan siklus yang sulit dipatahkan. Sebagai contoh, kemiskinan ekonomi dapat menyebabkan isolasi, karena individu tidak mampu membayar pendidikan atau transportasi, yang pada gilirannya membatasi peluang untuk meningkatkan kapasitas mereka. Salah satu poin penting dalam teori Chambers adalah bahwa kemiskinan tidak hanya soal angka atau statistik, tetapi juga melibatkan pengalaman subjektif. Orang miskin sering merasa tidak berdaya, terhina, dan

mengalami eksklusi sosial. Perasaan ini, meskipun sulit diukur, adalah bagian penting dari pengalaman kemiskinan yang harus dipahami untuk menciptakan solusi yang efektif. Chambers mengkritik pendekatan pembangunan tradisional yang terlalu fokus pada indikator kuantitatif, seperti pendapatan, dan mengabaikan aspek-aspek psikologis dan sosial.

Chambers juga menyoroti bahwa kemiskinan sering kali berakar pada struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil. Sistem ini menciptakan ketimpangan yang meminggirkan kelompok tertentu, seperti perempuan, minoritas, dan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan memerlukan reformasi struktural yang menciptakan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan peluang. Teori Robert Chambers sangat relevan dalam konteks pembangunan saat ini, terutama di negara berkembang. Pendekatannya yang partisipatif telah digunakan oleh berbagai organisasi internasional, LSM, dan pemerintah untuk menciptakan program yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Teori ini mengajarkan pentingnya mendengarkan suara orang miskin dan memahami kemiskinan dari perspektif mereka sendiri, sehingga solusi yang dihasilkan dapat benar-benar menjawab kebutuhan mereka.

## 2. Teori Modal Manusia (Gary S. Becker)

Gary S. Becker, seorang ekonom pemenang Nobel, mengembangkan pendekatan ekonomi terhadap isu-isu sosial, termasuk kemiskinan, melalui teori *human capital* (modal manusia). Dalam pandangan Becker, kemiskinan sering kali merupakan hasil dari kurangnya investasi dalam modal manusia, seperti pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Ia berpendapat bahwa modal manusia

memainkan peran penting dalam menentukan produktivitas dan pendapatan seseorang.

Becker melihat pendidikan dan pelatihan sebagai investasi ekonomi yang meningkatkan potensi produktivitas individu di masa depan. Kemiskinan, dalam kerangka ini, terjadi ketika individu tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengakses pendidikan atau pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka. Ini sering kali diperparah oleh kendala struktural seperti diskriminasi dan keterbatasan akses terhadap modal finansial. Selain itu, Becker mengembangkan pendekatan ekonomi terhadap pengambilan keputusan dalam rumah tangga miskin. Ia menggunakan analisis berbasis rasionalitas untuk menjelaskan bagaimana individu atau keluarga miskin membuat keputusan ekonomi dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya, meskipun sumber daya mereka terbatas. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana kebijakan publik, seperti subsidi pendidikan atau pelatihan kerja, dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap investasi modal manusia.

#### **2.1.1.2 Jenis-Jenis Kemiskinan**

Menurut Muhammad Ramadhan, dalam Nasikun Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

## 2. Kemiskinan Relatif

Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

## 3. Kemiskinan Kultural

Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meski pun ada bantuan dari pihak luar.

## 4. Kemiskinan Struktural

Situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Menurut pendapat Prof Mochtar Mas'ood mengatakan penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

### 1. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah timbul akibat kelangkaan sumber-sumber daya alam, kondisi tanah yang tandus, tidak ada pengairan dan kelangkaan prasarana.

### 2. Kemiskinan buatan

Kemiskinan buatan timbul akibat adanya modernisasi atau pembangunan yang membuat anggota masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata. Kemiskinan buatan juga dapat disebut dengan kemiskinan structural.

### 2.1.1.3 Ukuran Kemiskinan

Menurut BPS Penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapita perbulannya berada di bawah garis kemiskinan. Adapun tujuan dari garis kemiskinan adalah menjadi batas bagi pendapatan seseorang yang perlu dipenuhi supaya dapat memperoleh standar hidup yang mencukupi.

BPS mengukur kemiskinan menggunakan konsep memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dilihat dari sisi pengeluarannya apakah suatu individu mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atau tidak. BPS menetapkan Garis Kemiskinan dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Garis Kemiskinan.

Yang dimaksud dengan garis kemiskinan adalah total dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Apabila penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per bulannya berada di bawah garis kemiskinan, maka penduduk tersebut digolongkan menjadi penduduk miskin.

2. Garis kemiskinan Makanan (GKM)

Merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari.

3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)

Merupakan kebutuhan minimum seperti sandang, pendidikan, perumahan, dan kesehatan.

a. **Rumus perhitungan Garis Kemiskinan (GK):**

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

b. **Ciri-ciri Penduduk Miskin**

Ciri-ciri penduduk miskin yaitu:

- 1) Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan.
- 2) Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah.
- 3) Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja).
- 4) Kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area), dan
- 5) Kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup): bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi, dan kesejahteraan sosial lainnya.

**2.1.1.4 Indikator Kemiskinan**

Badan Pusat Statistik (2014) memberikan rumusan yang konkrit sebagai indikator utama kemiskinan adalah:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal tersebut dari tanah, bambu, kayu murahan.

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah dan tembok tanpa diplaster.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau Bersama-sama dengan rumah lainnya.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan Listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air, Sungai, dan air hujan.
7. Bahan bakar untuk masak sehari-hari adalah kayu bakar, arang atau minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakain baru dalam satu tahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas atau Poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh Perkebunan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga yaitu tidak sekolah, tidak tamat SD, dan tamat SD.
14. Tidak memiliki Tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, tenak atau barang modal lainnya.

Dalam hal ini diperlukan adanya kesepakatan yang tetap untuk membedakan antara miskin dan tidak miskin dengan acuan garis kemiskinan. Berikut rumus yang digunakan untuk mengetahui garis kemiskinan yaitu dengan *Headcount Index*. *Headcount index* merupakan indeks kemiskinan yang paling luas

penggunaannya, yaitu jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk yang terdapat di kawasan tersebut. *Headcount index* merupakan bagian dari penduduk yang memiliki pendapatan ataupun konsumsi dibawah garis kemiskinan. Kekurangan dari metode ini adalah tidak bisa menggambarkan kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan (World Bank Institute, 2019). Adapun rumus perhitungan headcount index adalah sebagai berikut:

$$P_0 = \frac{N_p}{n}$$

Keterangan:

$P_0$  = Head Count Index

$N_p$  = Jumlah Keluarga Dengan Pengeluaran Di Bawah Garis Kemiskinan (KK)

$n$  = Jumlah Keluarga Total (KK)

### **2.1.2 Pendidikan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan, pendidikan merupakan sebagai usaha yang telah direncanakan untuk menciptakan suasana dan proses belajar yang bertujuan supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif sehingga terciptanya peserta didik yang memiliki kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang baik yang nantinya akan berguna di masa mendatang.

Pendidikan merupakan segala sesuatu dalam kehidupan yang mempengaruhi pembentukan pemikiran dan perilaku seseorang. Pendidikan merupakan investasi modal manusia yang sangat penting. Dimana modal tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Manusia yang memiliki produktivitas yang tinggi akan merubah suatu negara menjadi lebih baik.

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena pendidikan adalah investasi yang sangat penting dan menjadi kunci dalam membentuk kemampuan suatu negara. Jika pendidikan suatu bangsa tidak berkembang dengan baik maka pembangunan suatu negara tersebut akan terganggu. Hal itu terjadi dikarenakan tidak terdapatnya sumber daya yang berkualitas untuk menunjang pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu sumber daya yang berkualitas sangat berperan penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

### **2.1.2.1 Teori Pendidikan**

#### **1. Teori Modal Manusia (*Human Capital*)**

Gary S. Becker mengembangkan teori *human capital* (modal manusia) yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu investasi ekonomi paling penting bagi individu dan masyarakat. Dalam pandangannya, pendidikan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas individu, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Ia menyamakan investasi dalam pendidikan dengan investasi dalam aset fisik, karena keduanya dapat menghasilkan "pengembalian" berupa peningkatan pendapatan dan peluang yang lebih besar di masa depan. Becker menekankan bahwa pendidikan memiliki efek langsung pada pendapatan dan mobilitas sosial. Individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki peluang kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang kurang berpendidikan. Selain itu, pendidikan juga memiliki efek eksternalitas positif bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas tenaga kerja, inovasi, dan stabilitas sosial.

Dalam konteks kebijakan publik, Becker mendukung intervensi yang mendorong akses pendidikan, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung. Subsidi pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan adalah contoh strategi untuk meningkatkan modal manusia suatu negara. Becker percaya bahwa peningkatan akses pendidikan merupakan kunci untuk mengurangi kemiskinan dan mempercepat pembangunan ekonomi.

## 2. Teori Alokasi atau Reproduksi Status Sosial

Pada tahun 1970-an, teori modal manusia mendapat kritik yang hebat. Ada yang berpendapat bahwa tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas pekerjaan, dan orang yang berpendidikan tinggi maupun yang berpendidikan rendah tidak lebih produktif jika melakukan pekerjaan yang sama. Teori ini juga menekankan bahwa dalam ekonomi modern saat ini, tenaga kerja yang sangat terampil tidak lagi diperlukan karena perkembangan teknologi yang pesat dan proses produksi yang semakin disederhanakan. Dengan demikian, produktivitas orang-orang dengan tingkat pendidikan rendah tetapi terlatih relatif sama dengan produktivitas orang-orang dengan tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi. Dalam teori alokasi ini, pendidikan diperlakukan sebagai lembaga sosial yang fungsinya mengalokasikan sumber daya manusia secara sosial. Tergantung pada tingkat pendidikan. Keinginan untuk memperoleh status yang lebih tinggi mendorong orang untuk mencari pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun orang-orang yang berpendidikan tinggi memiliki porsi pendapatan nasional yang lebih besar, peningkatan proporsi orang-orang yang berpendidikan tinggi di suatu negara belum tentu berarti pertumbuhan atau perluasan ekonomi (Nugroho, 2014).

### 3. Teori John Dewey

John Dewey adalah seorang filsuf, psikolog, dan pendidik terkemuka dari Amerika Serikat yang hidup antara tahun 1859 hingga 1952. Dalam bidang pendidikan, Dewey dikenal sebagai salah satu tokoh yang merevolusi cara pandang terhadap pembelajaran. Gagasannya dituangkan secara komprehensif dalam buku *Democracy and Education* yang diterbitkan pada tahun 1916. Melalui buku ini, Dewey menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan, melainkan juga sebagai proses yang memungkinkan manusia untuk berkembang, berpikir kritis, dan terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dewey mengusulkan konsep pendidikan yang berfokus pada pengalaman. Menurutnya, pendidikan adalah kehidupan itu sendiri, bukan sekadar persiapan untuk masa depan. Setiap pengalaman yang diperoleh siswa, baik di dalam maupun di luar kelas, memiliki nilai penting dalam membentuk pola pikir dan keterampilan mereka. Oleh karena itu, Dewey menekankan metode *learning by doing* atau belajar melalui pengalaman langsung. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya, siswa yang belajar tentang pertanian tidak cukup hanya membaca buku, tetapi juga perlu terlibat langsung dalam kegiatan bercocok tanam.

Dewey juga memandang sekolah sebagai miniatur masyarakat. Dalam pandangannya, sekolah harus mencerminkan kehidupan nyata, tempat siswa dapat belajar tentang nilai-nilai demokrasi, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Sekolah tidak seharusnya hanya menjadi tempat untuk menghafal fakta, tetapi juga ruang di mana siswa diajarkan untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan

memecahkan masalah secara kolektif. Dengan demikian, pendidikan menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat demokratis yang sehat. Lebih lanjut, Dewey memperkenalkan gagasan bahwa pendidikan adalah proses rekonstruksi pengalaman. Dalam hal ini, pengalaman masa lalu siswa dijadikan dasar untuk memahami dan menghadapi pengalaman baru. Guru, dalam teori Dewey, memiliki peran penting sebagai fasilitator yang membantu siswa menghubungkan apa yang sudah mereka ketahui dengan apa yang sedang mereka pelajari. Guru bukan lagi sebagai figur otoritatif yang hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi menjadi mitra dalam pembelajaran. Selain itu, Dewey menekankan pentingnya demokrasi dalam pendidikan. Pendidikan menurutnya harus inklusif, memungkinkan semua siswa untuk berpartisipasi dan mengembangkan potensi mereka secara penuh. Ia percaya bahwa melalui pendidikan yang demokratis, individu dapat belajar menghormati perbedaan, memahami perspektif orang lain, dan membangun hubungan yang sehat dalam masyarakat. Pendidikan yang baik tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas, tetapi juga warga negara yang peduli dan bertanggung jawab.

Konsep-konsep yang ditawarkan oleh Dewey kemudian menjadi dasar bagi pendekatan pendidikan progresif. Kurikulum yang fleksibel, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran kolaboratif adalah beberapa metode yang dipengaruhi oleh pemikirannya. Hingga saat ini, ide-ide Dewey tetap relevan, terutama dalam upaya menciptakan sistem pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Sebagai salah satu tokoh pendidikan terbesar di abad ke-20, John Dewey telah meninggalkan warisan pemikiran yang mendalam. Filosofinya mengajarkan kita bahwa pendidikan bukanlah aktivitas

yang terisolasi dari kehidupan, melainkan bagian integral dari keberlanjutan masyarakat dan perkembangan individu. Seperti yang ia tegaskan dalam *Democracy and Education*, pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil.

#### **2.1.2.2 Tujuan Pendidikan**

Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

#### **2.1.2.3 Ruang Lingkup Ilmu Pendidikan**

Jalur Pendidikan di Indonesia, menurut para ahli dapat dikategorikan dalam beberapa jenis berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Jalur pendidikan di Indonesia ada 4, yakni meliputi:

##### 1) Pendidikan Formal

Pendidikan Formal adalah proses pembelajaran yang berlangsung di lembaga pendidikan resmi, seperti sekolah, dengan kurikulum yang terstruktur, jenjang yang jelas, dan diakui oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MT/ sederajat, SMA/MA/ sederajat.

## 2) Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pasca sekolah menengah yang mencakup program pelatihan diploma, sarjana, magister, profesi, dan doktoral yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

## 3) Pendidikan Non formal

Pendidikan non formal adalah proses pembelajaran yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal, dengan struktur yang lebih fleksibel dan sering kali berfokus pada keterampilan praktis, minat tertentu, atau kebutuhan spesifik individu maupun kelompok. Pendidikan non formal biasanya tidak terikat pada kurikulum resmi, namun tetap memiliki tujuan yang jelas serta dapat diakui melalui sertifikat atau penghargaan lainnya. Seperti Kursus bahasa asing, pelatihan keterampilan teknis, seperti menjahit, memasak, atau desain grafis dan lainnya

## 4) Pendidikan informal

Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan di rumah di mana kegiatan belajar mengajar berlangsung secara mandiri. Hasil pendidikan non formal ini diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal apabila peserta didik lulus ujian yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.

### **2.1.2.4 Indikator Pendidikan**

Terdapat beberapa indikator pendidikan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain:

#### 1) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah adalah tahun lamanya sekolah yang diharapkan oleh seorang anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dapat dikatakan bahwa harapan lama sekolah merupakan total tahun lamanya sekolah yang diharapkan dapat ditempuh dan dirasakan oleh seseorang. Kondisi pembangunan sistem pendidikan di Indonesia dapat diketahui dengan cara melihat nilai harapan lama sekolah yang dihitung pada usia 7 tahun ke atas.

2) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah adalah total tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal menempuh pendidikan formal.

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa satu kelompok umur tertentu yang bersekolah sesuai dengan kelompok umurnya. Angka partisipasi murni dapat dilihat dengan cara membagi jumlah siswa kelompok umur tertentu yang bersekolah dengan jumlah penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang sekolah yang dihitung.

4) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan proporsi anak sekolah di suatu jenjang dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Angka Partisipasi Kasar dihitung dengan cara membagi jumlah

penduduk yang bersekolah tanpa mempermasalahkan umur di suatu jenjang dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi secara umum di suatu jenjang pendidikan.

#### 5) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah adalah rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama. Angka partisipasi sekolah bertujuan untuk melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Nilai Angka partisipasi sekolah yang semakin tinggi memiliki makna bahwa semakin besar penduduk yang memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan. Sebaliknya, semakin rendah nilai APS maka semakin kecil pula kesempatan penduduk untuk menempuh pendidikan.

### **2.1.3 Upah Minimum**

Karl Marx dalam *Das Kapital* (1867) melihat upah minimum sebagai bagian dari mekanisme eksploitasi dalam sistem kapitalisme. Menurut Marx, upah minimum dapat digambarkan sebagai jumlah minimum yang dibutuhkan oleh buruh untuk menghidupi diri mereka sendiri dan mereproduksi tenaga kerja mereka. Upah adalah pendapatan yang diterima seseorang dari pemberi kerja terhadap kontribusi jasa atau pekerjaan yang telah dan akan dilakukan. Upah merupakan unsur penting yang mempengaruhi kehidupan seseorang atau para pekerja karena upah merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat(30) Tentang Ketenagakerjaan upah di definisikan

sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Permen No.1 tahun 1999 pasal 1 ayat 1, upah minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum ialah upah terendah yang dijadikan standar oleh pemberi kerja untuk menentukan upah yang sebenarnya.

Upah minimum biasanya ditetapkan oleh pemerintah, dan ini bisa saja mengalami perubahan setiap tahunnya sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum tersebut. Menurut Sadono Sukirno (2005) upah adalah pembayaran atas jasa yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Muchdarsyah Sinungan (2000) berpendapat bahwa upah kerja adalah pencerminan pendapatan nasional dalam bentuk uang yang diterima oleh pekerja sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dicurahkan untuk pembuatan suatu produk. Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam pasal 41-50 Undang-undang No. 78 Tahun 2015. Sebagai mana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1-2 terdiri atas:

- 1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaringan pengaman.
- 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas: upah tanpa tunjangan dan upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Upah minimum terdiri dari:

- a) Upah Minimum Provinsi (UMP), adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi.
- b) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.
- c) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di suatu provinsi.
- d) Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota.

### **2.1.3.1 Teori Upah Minimum**

Ada teori-teori yang harus dan perlu diperhatikan, yaitu teori yang akan dipergunakan sebagai landasan dasar untuk menetapkan upah. Teori-teori tersebut adalah:

#### 1) Teori Upah Nominal (David Ricardo)

Menurut Teori ini, upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk membiayai segala keperluan hidup buruh atau tenaga kerja. Teori ini menegaskan kepada buruh, bahwa sejumlah uang yang diterimanya sebagai upah itu adalah sewajarnya demikian, karena memang demikian saja kemampuannya majikan.

#### 2) Teori Undang-undang Upah Besi, (Lassale)

Menurut teori ini upah nominal diatas hanya memenangkan majikan saja, sebab kalau majikan saja, sebab kalau teori itu yang dianut mudah saja majikan itu akan mengatakan cuma itu kemampuannya tanpa berfikir bagaimana susahnya buruh itu. Oleh karena itu menurut teori ini, buruh harus berusaha menentangnya (menentang teori upah normal itu) agar iya dapat mencapai kesejahteraan hidup.

### 3) Teori Dana Upah (Stuart Mill Senior)

Menurut teori dana upah buruh tidak perlu menentang seperti yang disarankan oleh teori Undang-undang upah besi, karena upah yang diterimanya itu sebetulnya adalah berdasarkan kepada besar kecilnya jumlah dana yang ada pada Masyarakat. Jika dana ini jumlahnya besar maka akan pula upah yang diterima buruh, sebaliknya kalau dana itu berkurang maka jumlah upah yang diterima buruh pun akan berkurang pula. Menurut teori ini yang akan dipersoalkan sebetulnya bukanlah berapa besar upah yang diterima buruh, melainkan sampai berapa jauhnya upah tersebut mampu mencukupi segala keperluan hidup buruh beserta keluarganya. Karena menurut teori ini dianjurkan, bahwa khusus untuk menunjang keperluan hidup buruh yang besar tanggungannya disediakan dana khusus oleh majikan atau negara yang disebut dana anak-anak.

#### **Pandangan Gary S. Becker tentang Upah Minimum**

Gary S. Becker, seorang ekonom yang terkenal dengan teori *human capital* (modal manusia), memiliki pandangan yang lebih pragmatis dan skeptis terhadap kebijakan upah minimum. Becker memandang pasar tenaga kerja sebagai mekanisme efisien yang menentukan upah berdasarkan produktivitas pekerja. Dalam kerangka ini, ia berpendapat bahwa upah minimum yang dipaksakan secara eksternal dapat menciptakan distorsi dalam pasar tenaga kerja. Becker menjelaskan bahwa upah mencerminkan kontribusi ekonomi pekerja, yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja. Oleh karena itu, jika upah minimum ditetapkan lebih tinggi dari produktivitas pekerja, perusahaan mungkin enggan mempekerjakan pekerja tersebut. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran, terutama di kalangan pekerja muda, kurang

terampil, atau mereka yang baru memasuki pasar kerja. Becker juga mengkritik bahwa upah minimum sering kali tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan. Banyak pekerja berupah rendah adalah pekerja paruh waktu atau anggota rumah tangga yang tidak miskin, sehingga kebijakan ini tidak selalu menargetkan mereka yang paling membutuhkan. Sebagai alternatif, Becker lebih mendukung pendekatan yang berfokus pada pengembangan modal manusia, seperti investasi dalam pendidikan, pelatihan kerja, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Menurutnya, cara ini lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas pekerja dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Becker menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong peningkatan keterampilan dan pelatihan kerja sebagai cara untuk meningkatkan daya saing pekerja dan memastikan bahwa mereka dapat memperoleh upah yang lebih tinggi secara alami. Dalam pandangannya, pemberian subsidi pendidikan atau insentif pelatihan lebih sesuai daripada menetapkan upah minimum yang kaku.

### **2.1.3.2 Jenis-jenis Upah**

Jenis-jenis upah menurut Zaeni Asyhadie yaitu:

#### 1) Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang di bayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan ketetapan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

#### 2) Upah Nyata (*riil wages*)

Upah riil adalah uang nyata yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah

tersebut yang akan tergantung dari:

- a) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima
- b) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan
- c) Upah Hidup

Upah hidup yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

- d) Upah Minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah (Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi/Bupati/Walikota), dan setiap tahun berubah.

Adapun tujuan ditetapkannya upah minimum yaitu:

- (1) Untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/buruh sebagai subsistem dalam suatu hubungan kerja.
- (2) Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang secara materiil kurang memuaskan.
- (3) Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan.
- (4) Untuk mengusahakan terjaminnya ketenagaan dan kedamaian kerja dalam perusahaan.

- (5) Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal.

### **2.1.3.3 Tujuan Upah**

Penguatan upah bertujuan untuk terpenuhinya standar hidup minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, dan perumahan sehingga terciptanya kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang berpendapatan rendah. Dengan adanya penetapan upah minimum, para pekerja mempunyai kekuatan yang akan melindungi pekerja. Semakin meningkat tingkat upah minimum maka akan meningkatkan pendapatan Masyarakat sehingga kesejahteraan mengalami peningkatan dan terbebas dari kemiskinan.

Tujuan penetapan upah minimum menurut adalah sebagai berikut:

- 1) Menghindari kemungkinan adanya eksploitasi pekerja.
- 2) Menghindari persaingan yang tidak sehat sesama pekerja .
- 3) Sebagai jaring pengaman untuk menjaga tingkat upah agar tidak menurun.  
Serta melindungi para pekerja.
- 4) Mengurangi tingkat kemiskinan absolut pekerja.
- 5) Mendorong peningkatan produktivitas melalui perbaikan gizi dan kesehatan pekerja.
- 6) Meningkatkan daya beli masyarakat sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum.
- 7) Menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis.

#### 2.1.3.4 Penetapan Upah

Penetapan upah minimum di Indonesia dilakukan setiap tahun yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak. Setiap Provinsi yang ada di Indonesia memiliki nilai upah minimum yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan hidup layak di setiap Provinsi berbeda-beda sehingga kebijakan upah minimum yang ditetapkan tidak bisa di sama ratakan. Terdapat wilayah yang memiliki nilai upah minimum yang tinggi, ada pun yang rendah. Itu semua bergantung kepada setiap pemimpin daerah dalam menetapkan upah minimum daerahnya sendiri dan melihat kebutuhan hidup layak di provinsi masing-masing. Penetapan upah minimum dapat dihitung sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDB_t)\}$$

Keterangan:

$UM_n$  = Upah minimum yang akan ditetapkan

$UM_t$  = Upah minimum tahun berjalan

Inflasi = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan

$\Delta PDB_t$  = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

#### 2.1.4 Tenaga Kerja

John Stuart Mill dalam bukunya "*Principles of Political Economy*" (1848). Ia menjelaskan tenaga kerja sebagai usaha manusia yang dilakukan baik secara fisik maupun mental untuk menghasilkan barang atau jasa yang bernilai bagi

masyarakat. Dalam pandangan Mill, tenaga kerja tidak hanya mencakup pekerjaan langsung yang menghasilkan produk, tetapi juga pekerjaan pendukung yang memungkinkan proses produksi berlangsung.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut teori Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi bergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi seperti jumlah penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal serta kemajuan teknologi. Dalam teori ini Solow-Swan menyatakan bahwa faktor tenaga kerja dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja di sini tidak hanya kuantitas tenaganya saja melainkan kualitas tenaga kerja juga diperhitungkan. Modal manusia atau *human capital* merupakan salah satu modal penting dalam meningkatkan produktivitas. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada individu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan produktivitasnya.

#### **2.1.4.1 Teori Tenaga Kerja**

##### **1. Teori Modal Manusia (Human Capital Theory)**

Diperkenalkan oleh Theodore Schultz dan Gary Becker, teori ini menyatakan bahwa pendidikan, pelatihan, dan kesehatan adalah bentuk investasi yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Modal manusia dianggap sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan menentukan tingkat upah individu berdasarkan keterampilan yang dimiliki.

## 2. Teori Kecocokan Pasar Tenaga Kerja (*Jovanovic, 1979*)

Teori Kecocokan Pasar Tenaga Kerja atau *Job Matching Theory* yang dikembangkan oleh Boyan Jovanovic pada tahun 1979 menjelaskan bahwa proses pencocokan antara pekerja dan pekerjaan tidak selalu berlangsung secara sempurna sejak awal. Baik perusahaan maupun individu tidak memiliki informasi lengkap mengenai sejauh mana kecocokan antara keterampilan pekerja dan tuntutan pekerjaan hingga mereka menjalani pengalaman kerja bersama. Oleh karena itu, hubungan kerja pada tahap awal sering kali bersifat percobaan. Jika dalam proses tersebut ditemukan ketidaksesuaian atau *mismatch*, maka kemungkinan besar akan terjadi pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja, atau perpindahan kerja. Sebaliknya, jika ditemukan kecocokan, maka hubungan kerja cenderung akan berlanjut dan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Teori ini menyoroti pentingnya kesesuaian antara kualitas tenaga kerja dengan jenis pekerjaan yang tersedia di pasar. Ketidaksesuaian tersebut sering kali muncul karena adanya jurang antara sistem pendidikan atau pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja yang sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi pengangguran terselubung dan meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja, diperlukan sistem pendidikan dan pelatihan yang adaptif serta mekanisme rekrutmen yang mampu menilai potensi kecocokan antara pekerja dan pekerjaan secara lebih akurat.

## 3. Teori Segmentasi Pasar Tenaga Kerja (*Michael Piore dan Peter Doeringer*)

*Dual Labor Market Theory* menyatakan bahwa pasar kerja terbagi menjadi dua segmen utama, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer menawarkan pekerjaan yang stabil, bergaji tinggi, memiliki jaminan sosial, serta

prospek karier yang jelas. Sebaliknya, pasar sekunder terdiri dari pekerjaan dengan upah rendah, tidak stabil, tanpa perlindungan kerja, dan minim peluang mobilitas. Menurut Michael Piore dan Peter Doeringer, segmentasi ini bersifat struktural dan menyebabkan pekerja di sektor sekunder sulit berpindah ke sektor primer. Teori ini menunjukkan bahwa ketimpangan dalam pasar kerja bukan semata akibat kurangnya lapangan kerja, tetapi juga karena perbedaan kualitas dan akses terhadap pekerjaan. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan tidak hanya untuk menciptakan pekerjaan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan membuka akses yang lebih merata ke sektor formal guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

#### **2.1.4.2 Pengelompokan Tenaga Kerja**

##### **1) Tenaga Kerja**

Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang dianggap mampu bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Tenaga kerja memiliki peranan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

##### **2) Bukan Tenaga Kerja**

Bukan tenaga kerja adalah orang yang dianggap tidak mampu dan tidak berkeinginan untuk bekerja meski pun ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bukan tenaga kerja adalah penduduk yang di luar usia, yaitu penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun, misalnya anak-anak dan lansia.

### 3) Angkatan Kerja

Menurut BPS, angkatan kerja merupakan penduduk perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif (usia kerja) yang berumur 15–64 tahun yang sedang bekerja dan/atau mencari pekerjaan (menganggur). Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja yang sudah bekerja atau pun yang masih mencari pekerjaan. Akan tetapi, tidak semua penduduk usia produktif termasuk angkatan kerja. Penduduk usia produktif yang tidak aktif kegiatan ekonomi tidak termasuk kelompok Angkatan kerja, misalnya pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pengangguran sukarela.

#### **2.1.4.3 Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja**

Masalah ketenagakerjaan yang utama di Indonesia adalah terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan untuk dimasuki pencari kerja. Pencari kerja dapat memperoleh kesempatan kerja di pasar tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja inilah terjadi interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Pasar tenaga kerja tergantung luas sempitnya kegiatan produksi. Pemakaian faktor produksi tenaga kerja ditentukan kebutuhan dunia usaha atau lapangan pekerjaan. Pasar tenaga kerja juga dipengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran. Pasar ini berbeda dengan pasar barang karena permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan.

#### 1) Permintaan Tenaga Kerja

Kegiatan produksi membutuhkan tenaga kerja sebagai pelaksana proses produksi. Permintaan tenaga kerja berasal dari rumah tangga produsen atau pihak pemberi kerja. Pemberi kerja memberikan kualifikasi tertentu untuk dipenuhi oleh tenaga kerja. Setelah diperoleh kesepakatan antara pemberi kerja dan pencari

kerja, pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberikan upah sesuai pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja.

## 2) Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi pada suatu perusahaan terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut.

- a) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di suatu negara.
- b) Jumlah barang yang dihasilkan.
- c) Besar keuntungan perusahaan.
- d) Tingkat investasi perusahaan.

## 3) Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja dilakukan oleh rumah tangga konsumen atau pencari kerja. Pencari kerja dengan kualifikasi tertentu berusaha mencari pekerjaan yang sesuai. Penawaran tenaga kerja dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Perubahan penawaran tenaga kerja dipengaruhi faktor-faktor berikut.

### a) Perubahan Selera Pekerjaan

Orientasi masyarakat terhadap pekerjaan mulai meningkat. Bagi seorang wanita, pekerjaan utama adalah mengasuh anak. Sejalan dengan perkembangan zaman Wanita berorientasi memasuki dunia kerja.

### b) Perubahan Kesempatan Alternatif

Penawaran tenaga kerja di setiap pasar tenaga kerja bergantung pada alternatif kesempatan yang ada di pasar tenaga kerja lainnya.

c) Migrasi

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain.

Perpindahan penduduk tersebut menyebabkan pergeseran tenaga kerja dari satu tempat ke tempat lain.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Pada bagian kajian pustaka ini penulis mengambil beberapa contoh penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan dalam melakukan penelitian skripsi yang akan dilakukan penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan judul skripsi ini, diantaranya sebagai berikut.

**Table 1.6**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun Penelitaian	Judul Penelitian	Persamaan	Hasil Penelitian
1	Sofian Rafil, 2019	Analisis Pengaruh Pendidikan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di provinsi Jawa Barat 2002-2017	Sama-sama meneliti kemiskinan dan memiliki variable independen yang sama yaitu Pendidikan dan upah minimum	Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Barat. Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, Upah minimum dalam jangka pendek berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, namun dalam jangka panjang pengaruhnya negatif tetapi tidak

				signifikan, karena kenaikan upah minimum masih rendah dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga di Jawa Barat.
2	Yolanda Destiara (2020)	Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Investasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2019	Meneliti variabel independen yang sama yaitu Pendidikan dan upah minimum, dan sama-sama meneliti kemiskinan	Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di DIY, di mana peningkatan pendidikan menurunkan kemiskinan. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) juga memiliki pengaruh negatif dan signifikan, karena kenaikan upah meningkatkan daya beli pekerja. Investasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan, karena dampaknya terhadap kesejahteraan butuh waktu lama.
3	Ade Irma Amhab 2022	Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum dan Tingkat Kesehatan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan Kemiskinan di kota Makasar	Meneliti variabel independen yang sama yaitu Pendidikan dan upah minimum, dan sama-sama meneliti kemiskinan	Hasil penelitian menunjukkan Pendidikan dan tingkat kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan, sedangkan upah minimum tidak signifikan. Pendidikan, upah

				<p>minimum, dan tingkat kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, namun partisipasi angkatan kerja perempuan tidak berpengaruh signifikan. Secara tidak langsung, pendidikan, upah minimum, dan kesehatan memengaruhi kemiskinan secara positif melalui partisipasi angkatan kerja perempuan.</p>
4	Khusnul Khotimah 2018	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran di DIY.	Meneliti variabel independen yang sama yaitu Pendidikan dan upah minimum	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif. Variabel angkatan kerja dan upah minimum berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran.</p>
5	Susanti 2019	Peran Pendidikan dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi tentang Relevansi di Sektor Informal	Sama-sama meneliti kemiskinan dan memiliki variable independen yang sama	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tinggi berpengaruh positif dalam menurunkan kemiskinan secara umum. Namun,</p>

		Indonesia	yaitu pendidikan	pengaruhnya kurang signifikan di sektor informal karena karakteristik pekerjaan yang lebih mengutamakan keterampilan praktis dibandingkan kualifikasi akademik.
6	Sutanto & Lestari 2020	Efektivitas Kebijakan Upah Minimum dalam Mengatasi Kemiskinan di Tengah Dominasi Sektor Informal	Sama-sama meneliti variable dependen yang sama yaitu kemiskinan dan memiliki variabel independent yang sama yaitu upah minimum.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan pekerja formal. Namun, dampaknya tidak signifikan dalam menurunkan kemiskinan secara keseluruhan, kemungkinan karena masih banyak pekerja di sektor informal yang tidak terpengaruh oleh kebijakan upah minimum.
7	Purwanto 2021	Ketidaksesuaian Keterampilan Tenaga Kerja dan Dampaknya terhadap Pengangguran serta Kemiskinan di Indonesia	Memiliki variabel dependen yang sama yaitu kemiskinan dan memiliki variabel independen yang sama yaitu tenaga kerja.	Hasil penelitian menunjukkan signifikan negatif, ketidak sesuaian keterampilan tenaga kerja menyebabkan pengangguran yang memperburuk kemiskinan.
8	Diana Putri Harlena	Analisis Pengaruh Pendidikan adan	Memiliki variabel	Hasil penelitian menunjukkan

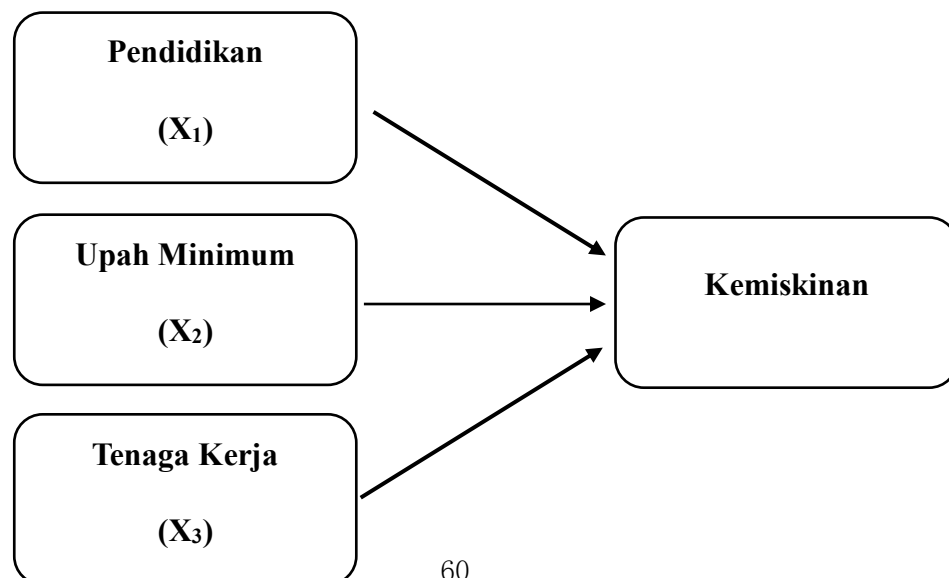
	2024	Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang	dependen yang sama yaitu kemiskinan dan memiliki variabel independen yang sama yaitu pendidikan	<p>pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang.</p> <p>Pengaruh Pendapatan terhadap Kemiskinan menunjukkan bahwa pendapatan juga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang.</p> <p>Pengaruh Simultan Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kemiskinan menunjukkan bahwa pendidikan dan pendapatan bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang.</p>
9	Anisa Rahmawati 2022	Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Indonesia	Memiliki variabel dependen yang sama yaitu kemiskinan dan memiliki variabel independen yang sama yaitu Pendidikan	Hasil penelitian menunjukkan Pendidikan dan pengangguran berpengaruh signifikan Positif terhadap kemiskinan, sedangkan upah minimum hanya menunjukkan pengaruh signifikan di

			dan Upah Minimum	daerah urban.
10	Farda Kirana Harira 2023	Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Banjar Baru Tahun 2011-2020	Memiliki variabel dependen yang sama yaitu kemiskinan dan memiliki variabel independen yang sama yaitu Pendidikan dan Upah Minimum	Hasil penelitian menunjukkan Pendidikan dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Banjarbaru.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan (Y) dan tiga variabel independen yaitu Pendidikan ( $X_1$ ), Upah Minimum ( $X_2$ ), dan Tenaga Kerja ( $X_3$ ).

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Konseptual**



## Persamaan Regresi Berganda

Model regresi

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon$$

Y : Tingkat Kemiskinan

X<sub>1</sub> : Pendidikan

X<sub>2</sub> : Upah Minimum

X<sub>3</sub> : Tenaga Kerja

$b_0, b_1, b_2, b_3$  : Kofisien Regresi

$\epsilon$  : Error term

a : Konstanta

### 2.4 Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah suatu hubungan atau asumsi yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Berdasarkan pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel maupun konsep.

#### a. Hubungan Antara Pendidikan dan Tingkat Kemiskinan

Seperti yang dikemukakan oleh Arsyad (1999) bahwa pendidikan berperan penting dalam mengurangi kemiskinan melalui perbaikan produktivitas dan pelatihan pada golongan miskin sehingga akan meningkatkan pendapatan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam ilmu ekonomi sering disebut dengan mutu modal manusia atau *human capital*.

Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan sangat berpengaruh karena pendidikan memberikan keterampilan maupun kemampuan untuk berkembang dan meningkatkan produktivitas dalam kehidupan. Semakin tingginya tingkat

Pendidikan, maka ilmu pengetahuan dan keahlian akan mengalami peningkatan, sehingga dapat mendorong produktivitas kinerja. Dengan tingginya produktivitas maka seseorang akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, dengan diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

b. Hubungan Antara Upah Minimum dan Tingkat Kemiskinan

Tujuan utama menetapkan upah minimum adalah untuk melindungi pekerja, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah, agar mampu mencukupi kebutuhan primer dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan serta membantu menekan tingkat kemiskinan, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan pendapatan masyarakat. Selain itu, penetapan upah minimum berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi dengan meningkatkan daya beli Masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Peran pekerja, pemerintah dan swasta diperlukan dalam menyikapi penetapan upah minimum dalam mencapai tujuan Bersama yakni pekerja atau buruh memperoleh kesejahteraan, perusahaan atau swasta semakin mengalami perkembangan dan lestari serta pemerintah mampu menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik. Maka dari itu jika upah minimum meningkat maka kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dan dapat menurunkan tingkan kemiskinan.

c. Hubungan Antara Tenaga Kerja dan Tingkat Kemiskinan

Tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat kemiskinan di suatu negara. Tingginya angka pengangguran dapat

memicu peningkatan kemiskinan, karena rumah tangga kehilangan sumber pendapatan yang stabil. Namun, memiliki pekerjaan saja tidak cukup untuk mengangkat seseorang dari kemiskinan, terutama jika pekerjaan tersebut tidak memberikan penghasilan yang layak, seperti yang sering terjadi di sektor informal dengan upah yang rendah. Untuk itu, kualitas pekerjaan menjadi faktor kunci dalam mengurangi kemiskinan.

Selain itu, peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja juga sangat penting, karena tenaga kerja yang terampil memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraannya. Ketimpangan kesempatan kerja antar wilayah juga berkontribusi terhadap kemiskinan, di mana daerah dengan akses terbatas terhadap pekerjaan cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui kebijakan yang mendukung peningkatan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja menjadi sangat penting. Pendekatan yang menyeluruh ini akan membuka peluang bagi tenaga kerja untuk meningkatkan pendapatan mereka dan akhirnya mengurangi kemiskinan secara signifikan.

Dari penelitian ini. Maka penulis dapat mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Upah Minimum berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Tenaga Kerja berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.